



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IR TIURMAULI SILALAHI
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 1004409

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.870.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/108 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.020.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/169 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.850.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 313.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
2. MOBIL, TOYOTA RAIZE GCVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.650.000

D. SURAT BERTAHAGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 114.168.252

F. HARTA LAINNYA Rp. 21.231.306

Sub Total Rp. 4.371.049.558

III. HUTANG Rp. 1.774.341.255

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.596.708.303

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.